

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi

Eko Indra Praza

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin

### Abstract.

This research aimed to analyze the financial performance of the District/ Municipality in Jambi Province and to determine the effect of financial performance either simultaneously or partially on capital expenditure. The data used in this research is a panel data comprising time series data is data in 2010 - 2013 and cross section data is data of 9 (nine) District and 2 (two) Municipality is located in the Province of Jambi. The analytical method used panel data regression analysis. The analysis showed that the financial performance of the District/ Municipality in Jambi Province is still relatively low as the PAD contribution to regional revenue is still small so transfer income still dominate the local revenue to finance most of the regional expenditure. The results of panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) showed that the financial performance simultaneously significant effect on capital expenditure allocation of the District/Municipality in Jambi Province from 2010 to 2013 and partially Ratio Degree of Decentralization significant positive effect on the allocation of capital expenditure. Financial dependency ratio, Financial Independence Ratio and the ratio degrees contributions public enterprises significant negative effect on capital expenditure . Effectiveness ratio of PAD does not significantly influence the allocation of capital expenditure.

---

*Keyword: Financial Performance, Decentralization, Financial Independence,*

### Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap alokasi belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data time series yaitu data tahun 2010 – tahun 2013 dan data cross section yaitu data 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang berada di Provinsi Jambi. Metode analisis yaitu analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Hasil regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan secara parsial Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

---

*Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia (SDM), dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan otonomi, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dibutuhkan SDM yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan memenuhi prinsip *value for money*, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja modal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011) yang menunjukkan

bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD, namun untuk rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian lainnya dilakukan Prihastuti, dkk (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara langsung akan berdampak pada perubahan alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi”**. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD. Sedangkan alokasi belanja modal dalam penelitian ini adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data *time series* yaitu data tahun 2010 – tahun 2013 dan data *cross section* yaitu data 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang berada di Provinsi Jambi, yang terdiri dari: Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Data yang digunakan berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang bersumber dari halaman situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

### Alat Analisis

#### *Analisis Deskriptif*

Analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan melihat rasio rasio keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio derajat kontribusi BUMD.

#### *Analisis Kuantitatif*

Model persamaan regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Dimana:

- Y : Alokasi Belanja Modal
- X<sub>1</sub> : Rasio Derajat Desentralisasi
- X<sub>2</sub> : Rasio Ketergantungan Keuangan
- X<sub>3</sub> : Rasio Kemandirian Keuangan
- X<sub>4</sub> : Rasio Efektivitas PAD
- X<sub>5</sub> : Rasio Derajat Kontribusi BUMD
- i : *Cross-section*

- t : *Time series*  
 : Intersep/konstanta  
 : Koefisien regresi  
 e : *Error term*

### Pemilihan Metode Estimasi

Model regresi dengan data panel secara umum mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross-section* maupun gabungan keduanya. Maka terdapat tiga pendekatan dalam regresi data panel ini yaitu :

1) *Pooled ordinary least square* (PLS)

Metode PLS juga dikenal sebagai *Common Effect Model* (CEM). Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan *slop* yang sama. Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda.

2) *Fixed effect model* (FEM)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi *intersep* dan *slope* yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3) *Random effect model* (REM)

REM digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap (FEM) yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu sehingga REM mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel acak.

Sebelum ditentukan metode regresi data panel yang akan dipakai, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut yaitu dengan Uji Chow dan Uji Hausmant. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan Eviews. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode PLS dan FEM. Dalam melakukan Uji Chow, dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: Metode PLS

Ha: Metode FEM

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability F*  $\geq 0.05$  artinya Ho diterima; maka metode yang dipilih adalah metode PLS.
2. Jika nilai *probability F*  $< 0,05$  artinya Ho ditolak; maka metode yang dipilih adalah metode FEM.

Uji Hausman dilakukan untuk memilih apakah menggunakan metode FEM atau REM. Namun, Uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa metode yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah metode PLS.

Selanjutnya untuk melakukan Uji Hausman, dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Metode REM

$H_a$ : Metode FEM

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai *probability Chi-Square*  $\geq 0.05$ . artinya  $H_0$  diterima, maka metode yang dipilih adalah metode REM.
2. Jika Nilai *probability Chi-Square*  $< 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak, maka metode yang dipilih adalah metode FEM.

## Uji Statistik

### a) Uji F

Uji kelayakan model (Uji F) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program *Eviews*, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi *p-value* maka  $H_A$  diterima. Sebaliknya apabila signifikansi *p-value* > maka  $H_A$  ditolak. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah 1%, 5% dan 10%.

### b) Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan menggunakan Program *Eviews*, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan = 1%, 5% dan 10%.. Apabila tingkat signifikansi maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima. Sebaliknya bila tingkat signifikansi > maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak.

### c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

#### *Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi*

Secara keseluruhan bila dilihat dari rasio derajat desentralisasi dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berada pada kisaran kurang dari 10% sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan desentralisasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih belum optimal.

### ***Perkembangan Rasio Ketergantungan keuangan***

Secara keseluruhan bila dilihat dari rasio ketergantungan keuangan dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong tinggi. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih sangat mengandalkan sumber pendapatan transfer Pemerintah Pusat/Provinsi untuk membiayai belanja daerahnya.

### ***Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan***

Secara keseluruhan bila dilihat dari rasio kemandirian keuangan dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong rendah, yaitu berada pada kisaran dibawah 10%. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih mengandalkan bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

### ***Perkembangan Rasio Efektivitas PAD***

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, berupa rasio efektivitas PAD rata-rata selalu di atas 100% dan dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti kemampuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam merealisasikan PAD yang direncanakan sudah baik. Namun perlu diperhatikan bahwa apakah target PAD sudah sesuai dengan potensi riil daerah atau belum? Selama ini permasalahan yang sering terjadi adalah target pendapatan masih banyak yang tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Target pendapatan cenderung didasarkan pada realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya.

### ***Perkembangan Rasio Derajat Kontribusi BUMD***

Secara keseluruhan bila dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD dapat dikatakan bahwa tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari perusahaan daerah.

## **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi**

### **Hasil Regresi**

Setelah dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman maka diperoleh metode yang paling tepat untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode FEM dengan hasil regresi sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Regresi dengan metode FEM (*Fixed Effect Model*)**

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2010 2013				
Included observations: 4				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 44				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.96291	24.31369	3.000898	0.0056
X1?	10.48574	2.572854	4.075529	0.0003
X2?	-0.421210	0.243456	-1.730129	0.0946
X3?	-10.71409	2.851393	-3.757492	0.0008
X4?	0.016005	0.025908	0.617747	0.5417
X5?	-0.287518	0.131184	-2.191718	0.0369
Fixed Effects (Cross)				
_KER--C	-4.867601			
_MER--C	-5.420662			
_SAR--C	1.436821			
_BTH--C	-8.867701			
_MJB--C	1.959646			
_TJT--C	11.63066			
_TJB--C	9.931268			
_TEB--C	8.513814			
_BUN--C	-7.082724			
_JBI--C	-11.27145			
_SPN--C	4.037933			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.861696	Mean dependent var		28.66341
Adjusted R-squared	0.787605	S.D. dependent var		7.873805
S.E. of regression	3.628747	Akaike info criterion		5.690939
Sum squared resid	368.6985	Schwarz criterion		6.339736
Log likelihood	-109.2007	Hannan-Quinn criter.		5.931544
F-statistic	11.63021	Durbin-Watson stat		1.811202
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi pada tabel 2 yang dilakukan dengan menggunakan metode FEM maka didapat persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y_{it} = 72,96291 + 10,48574X1_{it} - 0,421210X2_{it} - 10,71409X3_{it} + 0,016005X4_{it} - 0,287518X5_{it} + e_{it}$$

### Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis terdiri dari pengujian Uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, Uji t untuk menguji pengaruh secara parsial dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

#### a. Uji F (Secara Simultan)

Uji kelayakan model (Uji F) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan, yaitu dengan

membandingkan tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya apabila signifikansi  $p\text{-value} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima.

Dari hasil regresi dengan metode FEM dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas F statistik ( $P\text{-value}$ ) sebesar  $0,000000 < 0,01$  maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 99% terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

#### **b. Uji t (Secara Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan  $\alpha$ . Apabila tingkat signifikansi  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sebaliknya bila tingkat signifikansi  $p\text{-value} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dari hasil regresi dengan metode *fixed effect model* (FEM) dapat dilihat bahwa :

1. Variabel  $X_1$  Probabilitas  $0,0003 < 0,01$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa variabel Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tingkat kepercayaan 99% atau tingkat signifikansi 1%.
2. Variabel  $X_2$  Probabilitas  $0,0946 > 0,10$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa variabel Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tingkat kepercayaan 90% atau tingkat signifikansi 10%.
3. Variabel  $X_3$  Probabilitas  $0,0008 < 0,01$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tingkat kepercayaan 99% atau tingkat signifikansi 1%.
4. Variabel  $X_4$  Probabilitas  $0,5417 > 0,10$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya bahwa variabel Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Variabel  $X$  Probabilitas  $0,0369 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa variabel Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%.

#### **c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *fixed effect model* (FEM) koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.787605. hal ini menunjukkan bahwa 78,76% Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Sedangkan 21,24% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi antara lain:
  - a. Dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih kecil sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan desentralisasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih belum optimal.
  - b. Dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan dapat disimpulkan bahwa Ketergantungan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong tinggi. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih sangat mengandalkan sumber pendapatan transfer Pemerintah Pusat/Provinsi untuk membiayai belanja daerahnya.
  - c. Dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong rendah. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih mengandalkan bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara rata-rata selalu di atas 100% dan dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti kemampuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam merealisasikan PAD yang direncanakan sudah baik.
  - e. Dilihat dari Rasio Derajat Kontribusi BUMD dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari perusahaan daerah.
2. Hasil analisis dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model (FEM)* menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
3. Hasil analisis dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model (FEM)* secara Parsial menunjukkan bahwa :
  - a. Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
  - b. Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
  - c. Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
  - d. Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

- e. Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

### **Saran-Saran**

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan database potensi pajak dan retribusi daerah dengan cara updating database secara periodik oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar penentuan besarnya anggaran pendapatan dapat dihitung berdasarkan data faktual, bukan dengan hanya sekedar menaikan prosentase tertentu dari anggaran atau realisasi pendapatan pajak dan retribusi tahun sebelumnya.
2. Intensifikasi sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui rasionalisasi tarif dan basis pajak dan retribusi daerah. Dengan tujuan agar penetapan pajak tidak lagi menggunakan tarif tetap tanpa memperhitungkan jumlah pendapatan objek pajak.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.
4. Selain pajak dan retribusi daerah, peran laba BUMD terhadap PAD juga perlu ditingkatkan. Sehingga BUMD dapat menopang APBD dalam membiayai daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsa, I. K. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. Tesis S-2 Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Azhar, Mhd Karya Satya. 2008, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Bappenas. 2004. Indonesia. Laporan Perkembangan Pencapaian tujuan pembangunan millenium (millenium Development goals). Jakarta: Bappenas.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- BPKP, 2012. Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi).
- Damarsari,R.; Junaidi ;Yulmardi Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 9-20
- Darmayasa, I. N dan Suandi, I. K (2014). Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. Politeknik Negeri Bali
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: RMBOOKS.
- Falleti, T. G. 2005. A Sequential Theory of Decentralization : Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 99, 327 – 346.

- Hafidh, Aula Ahmad. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, 109-120
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012, *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor : IPB Press.
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Airlangga.
- Machmud, Masita, dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 14 no. 2
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mahsun, Muhamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, Kadek dan Dwirandra, A.A.N.B. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada alokasi belanja modal di Provinsi Bali. ISSN: 2302-8556
- Prihastuti, A.H, dkk. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Sorot*. Vol. 10, No.2, Hal. 143-154.
- Ratmono, Dwi dan Solihin, Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Sidik, Machfud. 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Sidang Pleno X ISEI. Batam, Indonesia: ISEI.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sularso, H., dan Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol.1 No.2: 109-124.

- Suparmoko. 2010. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Suwandi, Kurni Adi dan Tahar, Afrizal (2015), Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). Jurnal InFestasi. Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 118 – 136.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. Desentralisasi Ekonomi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.